JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 839-847
DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3332
http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gresik

Thoyib Hadirianto, Sri Wibawani
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Correspondence email: hadirianto86@gmail.com; sri_wibawani.adneg@upn.jatim.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program keluarga harapan di Kabupaten Gresik. Berdasar pada Kabupaten Gresik yang dinobatkan menjadi pengelolaan program keluarga harapan yang terbaik di Indonesia pada Tahun 2019, namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyaluran program keluarga harapan di Kabupaten Gresik. Dengan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan yang dipilih sebagai objek informasi adalah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gresik. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi menurut Dunn (2003), yang terdiri dari 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih belum memenuhi indikator efektivitas, perataan, kecukupan, ketepatan. Sedangkan dari indikator efisiensi dan resposivitas sudah cukup baik. Sehingga evaluasi kebijakan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik dapat dinilai masih kurang maksimal.

Kata kunci : evaluasi; kabupaten gresik; program keluarga harapan; William N Dunn.

Abstract. *This study aims to describe the evaluation of the family hope program in Gresik Regency. Based on Gresik Regency which has been named the best hopeful family program management in Indonesia in 2019, but in reality there are still various problems in the distribution of the hopeful family program in Gresik Regency. With descriptive qualitative methods and data collection techniques, namely interviews, observation and documentation, the types of data used are primary data and secondary data. Informants selected as information objects were Gresik District Social Service employees and beneficiary families in Gresik District. The theory used is the theory of policy evaluation according to Dunn (2003), which consists of 6 indicators namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriatness. The results showed that the evaluation of the implementation of the family hope program in Gresik Regency still did not meet the indicators of effectiveness, equity, adequacy and appropriatness. While the indicators of efficiency and responsiveness are good enough. So that the evaluation of the family hope program policy in Gresik Regency can be assessed as still not optimal.*

Keywords **:** *evaluation; gresik regency; family hope program; William N Dunn.*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, pembangunan dalam suatu negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan setiap aspek kehidupan yang ada di negara dari kondisi saat ini kearah yang lebih baik kedepannya. Salah satu pembangunan yang hingga saat ini masih diupayakan oleh pemerintah pusat, khususnya negara yang sedang berkembang adalah masalah mengenai pengentasan kemiskinan. Salah satu negara yang hingga saat ini masih memiliki masalah serius terhadap pengentasan kemiskinan yang berada di kawasan Asia adalah Indonesia (Razali & Putri, 2020). Kemiskinan dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, yaitu rendahnya kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, dan gizi (Tlonaen et al., 2014). Dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia yang hidup tidak layak dan berada dibawah garis kemiskinan mencapai 27,55 juta jiwa. Maka pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dengan mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, pada setiap tahunnya negara meningkatkan biaya pengeluaran untuk melakukan program-program dan usaha-usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan (Panjaitan, 2018). Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam memperbaiki kemiskinan yang bertumpu pada bantuan dan perlindungan sosial serta meningkatkan efektivitas dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan melalui implementasi program yang bersifat secara langsung. Melihat

bahwa terdapat banyak sekali kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat mencapai *goals*nya, maka dalam implementasi kebijakan publik sangat perlu dilakukan pengawasan (Wibawani et al, 2021)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, salah satu kebijakan program pemerintah yang ditujukan sebagai solusi dalam melakukan pengentasan kemiskinan adalah program keluarga harapan. Program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang diatur sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Menurut pedoman pelaksanaan tahun 2021, penerima bantuan program keluarga harapan dapat dibedakan berdasarkan beberapa komponen. Komponen tersebut adalah komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial. Sejak tahun 2008 program ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Gresik. Implementasi program keluarga harapan di Kabupaten Gresik untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dengan berupa pemeberian dana bantuan yang ditujukan sebagai biaya menyekolahkan anak dan mendapatkan fasilitas kesehatan.

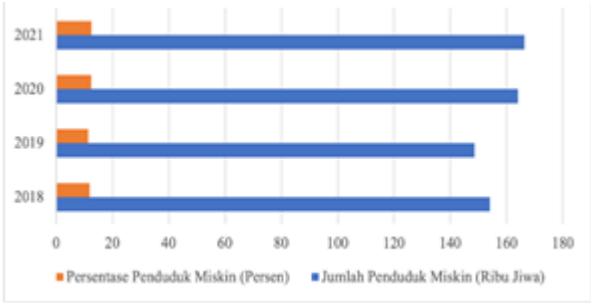

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2022

Gambar 1
Persentase Kemiskinan di Kabupaten Gresik, Tahun 2018-2021

Gambar 1 dapat diketahui jumlah dan persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Gresik mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021, yakni pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 148,61 ribu jiwa dengan persentase 11,35%, kemudian naik jumlah penduduk miskin sebanyak 166.35 ribu jiwa dengan persentase 12,42% Namun, sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 ke tahun 2019 dari 11,89% ke 11,35%. Pada tahun 2019 Kabupaten Gresik dinobatkan menjadi pengelolaan program keluarga harapan terbaik di Indonesia. Namun dalam kenyataannya masih ada permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kebijakan program di Kabupaten Gresik. Dalam penerapan bantuan program keluarga harapan ditemukan berbagai kendala dan hambatan terkait dengan transparansi mengenai bantuan program keluarga harapan sehingga menimbulkan demonstrasi di Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Kemudian adanya pengunduran diri dari keluarga penerima bantuan tetapi dana bantuan masih dicairkan setiap bulannya, lanjut lagi adanya ketidaksesuaian data yang ada pada Kementerian Sosial dengan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Penelitian Larasati & Liahati (2018), dinyatakan bahwa implementasi program keluarga harapan sudah menghasilkan hal yang baik dinilai dari rasa tanggung jawab, rasa kepedulian, memberikan motivasi dan mendorong kesadaran peserta program dalam memenuhi tujuan yang diharapkan. Sedangkan, hasil penelitian Zahrawati & Muchtar (2018) menunjukkan bahwa masyarakat sendiri tidak menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan yang telah ada pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Sejalan dengan yang dikemukakan Kurniawan et al. (2021) bahwa implementasi kebijakan haruslah dianalisis melalui evaluasi supaya dapat dilihat *output* dan *impact.* Dengan begitu, kebijakan dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik (Razali & Putri, 2020).

Keberhasilan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik dapat dinyatakan telah berhasil apabila hasil dari evaluasi kebijakan tersebut sudah bisa memenuhi ukuran-ukuran yang dibutuhkan untuk keberhasilan kebijakan. Suatu kebijakan program yang telah dilaksanakan haruslah diukur dengan melakukan evaluasi agar hasil yang akan dicapai bisa diketahui, apakah hasil dalam pelaksanaan kebijakan program sudah sesuai dengan diharapkan atau hasil tersebut malah tidak sesuai dan menyimpang dari yang diharapkan, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sehingga penilitian ini memanfaatkan data kualitatif dan

kemudian dijabarkan secara deskriptif. Menurut Anggara (2015), metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian *naturalistic* karena penelitian ditujukan pada kondisi objek alamiah. Lokus penelitian ada di Kabupaten Gresik. Lokus ini dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang membuat peneliti tertarik, yaitu terjadi kenaikan persentase jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Gresik, program keluarga harapan di Kabupaten Gresik dinobatkan menjadi pengelolaan program yang terbaik di Indonesia pada Tahun 2019, terdapat berbagai permasalahan dalam penyaluran program keluarga harapan di Kabupaten Gresik. Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang didapatkan dari kegiatan wawancara dengan informan terhubung dalam penelitian ini. Menurut Hardani et al. (2020) menjelaskan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan dalam Hardani et al. (2020), sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Selain itu teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu melalui observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati secara langsung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana kebijakan program dan masyarakat Kabupaten Gresik terkait dengan program. Sedangkan, untuk wawancara dilaksanakan bersama Koordinator Tim Program Keluarga Harapan Kabupaten Gresik, Kepala Bidang Perlidungan Dan Jaminan Sosial, Tim Pengelola Data, Pendamping Program tingkat kecamatan, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Maka, untuk memperkuat hasil penelitian diperlukan juga dokumentasi penelitian yang didapatkan melalui data secara langsung maupun tidak langsung dari informan yang terkait dengan penelitian tersebut.

HASIL

Berdasarkan dengan rumusan masalah dari penelitian, fokus pada penelitian ini adalah mengenai evaluasi kebijakan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik. Fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai penilaian terhadap implementasi kebijakan yang dapat berdampak bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, hasil dan pembahasan dihasilkan dari data yang dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Efektivitas

Pada Indikator efektivitas dilakukan atas dasar dari tujuan adanya kebijakan tersebut. Dalam hal ini, efektivitas dari program keluarga harapan di Kabupaten Gresik dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Kemensos.

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KPM (Orang)
1	GRESIK	BALONGPANGGANG	2153
2	GRESIK	BENJENG	3020
3	GRESIK	BUNGAH	2438
4	GRESIK	CERME	2817
5	GRESIK	DRIYOREJO	2157
6	GRESIK	DUDUKSAMPEYAN	2171
7	GRESIK	DUKUN	3142
8	GRESIK	GRESIK	1216
9	GRESIK	KEBOMAS	1089
10	GRESIK	KEDAMEAN	2827
11	GRESIK	MANYAR	1978
12	GRESIK	MENGANTI	2937
13	GRESIK	PANCENG	2327
14	GRESIK	SANGKAPURA	2696
15	GRESIK	SIDAYU	2136
16	GRESIK	TAMBAK	1617
17	GRESIK	UJUNGPANGKAH	2714
18	GRESIK	WRINGINANOM	2809
JUMLAH			42244

Sumber **:** Dokumentasi dari Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Gresik, 2022

Gambar 2
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Gresik

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik. Maka program tersebut memberikan bantuan dana yang dipergunakan untuk membiayai biaya pendidikan anak, penggunaan fasilitas kesehatan dan kesenjangan sosial. Selain itu kegiatan edukasi dan sosialisasi juga dilakukan sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam menggunakan akses layanan tersebut. Namun dalam kenyataanya masyarakat masih belum merasa terpacu untuk bisa mendirikan usaha sendiri, ini terbukti dengan masih tingginya angka keluarga penerima manfaat di Kabupaten

Gresik dengan jumlah 42.244 kepala keluarga.

2. Pemberian bantuan sosial program keluarga harapan juga ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat. Masyarakat peserta program keluarga harapan sudah merasakan keringanan pada pengeluaran biaya pendidikan anak mereka. Program ini juga memberikan edukasi terkait dengan kewirausahaan dalam upaya memberikan wawasan kepada setiap keluarga penerima manfaat untuk bisa memajukan pendapatan hasil mereka. Ini terbukti dari adanya masyarakat di Kabupaten Gresik khususnya di Kecamatan Gresik yang melakukan graduasi atau masyarakat penerima bantuan yang sudah bisa meningkatkan pendapatan sendiri sehingga. Hal ini juga ditunjukkan dari jumlah keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gresik bahwa peserta program di Kecamatan Gresik tercatat menjadi nomor 2 terendah dari 18 kecamatan dengan jumlah 1216 penerima bantuan. Namun dalam kenyataanya masyarakat masih belum merasa terpacu untuk bisa mendirikan usaha sendiri, ini terbukti dengan masih tingginya angka keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gresik dengan jumlah 42.244 kepala keluarga.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian dari keluarga penerima manfaat dalam menggunakan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Program keluarga harapan diketahui sebagai bantuan yang bersyarat dan wajib dilaksanakan oleh penerima. Keluarga penerima manfaat yang terdaftar harus memiliki upaya yang berkelanjutan sesuai dengan komponen bantuan yang diterima oleh mereka. Jika penerima yang mengikuti program tidak sesuai dengan upaya mereka, maka bantuan sosial yang diberikan akan diberhentikan. Dari kewajiban yang ada pada program, nantinya akan bisa menciptakan pola perilaku baru pada peserta program. Keluarga penerima manfaat yang mendapatkan komponen pendidikan, mereka mempunyai kewajiban sesuai dengan peraturan program, dimana mereka harus mengikuti proses kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. Peserta yang mendapatkan komponen kesehatan, diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan untuk penerima bantuan yang mendapatkan komponen kesejahterann sosial wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali. Dalam hal tersebut setiap perwakilan keluarga penerima manfaat program juga diberikan edukasi yang dilakukan pada kegiatan *family development session*. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberi arahan kepada setiap orang tua untuk bersikap baik dan memotivasi anak agar bisa terus belajar, dan mengutamakan kesehatan pada anak usia dini serta kesejahteraan lansia yang ada di dalam keluarga penerima manfaat. Namun pada kenyataannya masyarakat berpendapat bahwa kebutuhan untuk pendidkan anak lebih diutamakan dan bisa menuju ke tingkat yang lebih tinggi.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dari tujuan program keluarga harapan ini, diketahui bahwa pelaksanaan program di Kabupaten Gresik masih belum terwujud dengan baik. Karena dari angka keluarga penerima manfaat di setiap kecamatan masih tinggi dengan jumlah 42244 keluarga. Ini membuktikan bahwa program masih belum efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan penjelasan tujuan dilaksanakan program keluarga harapan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik. Maka program tersebut memberikan bantuan dana yang dipergunakan untuk membiayai biaya pendidikan anak, penggunaan fasilitas kesehatan dan kesenjangan sosial. Selain itu kegiatan edukasi dan sosialisasi juga dilakukan sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam menggunakan akses layanan tersebut. Namun dalam kenyataanya masyarakat masih belum merasa terpacu untuk bisa mendirikan usaha sendiri, ini terbukti dengan masih tingginya angka keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gresik dengan jumlah 42.244 kepala keluarga.

Efisiensi

Pada indikator efisiensi dapat dipahami sebagai penilaian berdasarkan seberapa besar penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, semakin sedikit sumber daya yang digunakan, maka semakin efisien pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini, efisiensi berkaitan dengan banyaknya usaha untuk mencapai keberhasilan tujuan diadakannya program keluarga harapan. Pada pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik, sumber daya yang diperlukan yakni sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya fasilitas.

1. Sumber daya manusia

   Hasil evaluasi pada indikator efisiensi sumber daya manusia yang ada untuk memanajemen proses bantuan program keluarga harapan, baik dari panitia bagian pendataan hingga penyaluran sudah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya masing-masing, Hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia ditentukan dan dipilih oleh Kementerian Sosial melalui *open recruitment* dengan *qualification* atau sistem pemilihan yang ketat. Seperti halnya pendamping program keluarga harapan yang berasal dari pekerja sosial sehingga sudah terbiasa dengan interaksi, komunikasi dan sosialisasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Koordinator Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gresik, jumlah pendamping program keluarga harapan untuk Kabupaten Gresik diketahui terdapat sebanyak 151 orang.

2. Sumber daya waktu

   Pada indikator efisiensi sumber daya waktu dimaksudkan sebagai waktu kegiatan *family development session* oleh pendamping Program Keluarga Harapan kepada para Keluarga Penerima Manfaat. Pada umumnya, kegiatan *family development session* harus tersampaikan semua materinya selama satu tahun, sehingga untuk pertemuannya dilakukan setiap sebulan sekali. Menurut hasil wawancara dan observasi, kegiatan tersebut sudah mampu dilaksanakan oleh pendamping program keluarga harapan di Kabupaten Gresik selama ini. Namun, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada satu waktu khusus atau belum dijadwal dengan baik. Artinya, waktu dan tempatnya bersifat kondisional atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara pendamping dengan keluarga penerima manfaat.

3. Sumber daya fasilitas

   Pada indikator efisiensi sumber daya fasilitas merupakan cakupan fasilitas yang menyokong kegiatan terkait dengan program keluarga harapan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik terdapat kegiatan *family development session*. Fasilitas yang diberikan pendamping program keluarga harapan untuk para keluarga penerima manfaat pada kegiatan tersebut berisi materi-materi penguatan keluarga melalui modul yang bertema kehidupan sehari-hari, seperti modul kesehatan atau pengelolaan keuangan. Sedangkan, untuk fasilitas penunjang seperti laptop atau alat elektronik lainnya merupakan fasilitas yang disediakan sendiri oleh pendamping. Selain kegiatan *family development session*, terdapat kegiatan proses penyaluran bantuan program keluarga harapan. Saat ini proses penyaluran tersebut sudah melalui mesin ATM yang sebelumnya masih berupa uang tunai melalui kantor pos yang berdampak pada penyalahgunaan bantuan atau kecurangan yang bisa saja terjadi. Meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan, namun banyak para keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gresik yang masih belum memahami tata cara penggunaan media tersebut, terutama para lansia. Namun, hal tersebut masih bisa tertangani dengan baik karena pendamping program keluarga harapan serta keluarga penerima manfaat lainnya yang membantu.

Tingkat efisiensi pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik sudah tergolong efisien. Hal ini dikarenakan pemenuhan sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan *competence* masing-masing, seperti pendamping program keluarga harapan yang berasal dari pekerja sosial. Kemudian, pemenuhan sumber daya waktu yang diarahkan bersifat kondisional. Meskipun ini akan lebih baik jika terdapat jadwal rutin sehingga para keluarga penerima manfaat bisa mempersiapkan diri, namun karena sudah sesuai kesepakatan bersama maka tidak ada yang dapat dipermasalahkan. Terakhir, untuk pemenuhan sumber daya fasilitas yang sudah baik karena terdapat fasilitas berupa modul untuk menunjang kegiatan terkait program keluarga harapan.

Kemudian, untuk proses penyaluran juga sudah melalui mesin ATM agar semakin efisien.

Kecukupan

Pada Indikator kecukupan memiliki kriteria yang berhubungan dengan bagaimana hasil dari kebijakan dapat mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat. Suatu kebijakan dapat dikatakan memenuhi kriteria kecukupan apabila telah berhasil menerapkan kebijakan tersebut untuk mengatasi masalah yang ada sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan. Kebijakan program keluarga harapan dikeluarkan sebagai inovasi baru untuk menanggulangi kemiskinan dan memperbaiki kekurangan dari program bantuan sebelumnya yang belum optimal dalam mengubah pola pikir masyarakat penerima bantuan agar bisa lebih baik dan maju. Kebijakan program keluarga harapan juga memenuhi kriteria kecukupan apabila kebijakan program tersebut dapat menghilangkan masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai pendidikan sekolah anaknya. Serta mampu meringankan beban biaya pengeluaran masyarakat, terutama pada pendidikan.

Pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih kurang dalam memenuhi kriteria kecukupan. Karena dari keseluruhan keluarga penerima manfaat yang ada di Kabupaten Gresik masih sebanyak 42.244 keluarga penerima. Diketahui dari 18 kecamatan di Kabupaten Gresik yang memiliki jumlah keluarga penerima manfaat paling banyak yaitu, Kecamatan Dukun dengan total 3.142 jiwa, kemudian Kecamatan Benjeng dengan jumlah 3.020 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di Kabupaten Gresik masih banyak dan belum teratasi dengan maksimal. Meskipun demikian, keluarga penerima manfaat telah merasa tercukupi dan terbantu terhadap biaya pendidikan anak. Karena keluarga penerima manfaat yang memiliki kriteria anak usia sekolah berhak untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Selain itu mereka berkewajiban untuk mengikuti proses kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. Namun sangat disayangkan bantuan tersebut dirasa oleh keluarga penerima manfaat hanya mencukupi untuk kebutuhan biaya sekolah anak, sedangkan untuk pendapatan sehari-hari atau kebutuhan pokok lainnya masih kurang cukup.

Perataan

Pada indikator perataan dapat dipahami sebagai keadilan setiap kelompok sasaran dari kebijakan mendapatkan kedudukan dan hak yang sama. Berdasarkan muatan hasil penelitian dari indikator ini, program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih belum memenuhi kriteria perataan, karena belum menjangkau para penerima yang membutuhkan secara keseluruhan. Dalam mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini, dibutuhkan komponen tertentu sebagai syarat agar bisa terdaftar menjadi penerima. Nantinya keluarga penerima manfaat yang telah memenuhi syarat akan didaftarkan melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan *Sosial-Next Generation* (SIKS-NG) sebagai Data Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, dalam pelaksanaan program masih terdapat permasalahan yakni adanya data yang tidak sesuai dari yang dibutuhkan, seperti data dari dispendukcapil, dapodik, dan kementerian negara. Dengan demikian, pada indikator ini diketahui program keluarga harapan di Kabupaten Gresik belum memenuhi kriteria perataan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan. Karena adanya faktor hambatan tertentu yakni data yang dikirim dari desa tidak dilakukan pembaruan atau *update* data sehingga keluarga penerima manfaat yang terindikasi sudah mampu masih tetap diberi bantuan tersebut. Hal ini membuat masyarakat miskin dan rentan keseluruhan yang seharusnya bisa menjadi sasaran dari kebijakan program keluarga harapan menjadi tidak mendapatkan bantuan program tersebut.

Responsivitas

Pada indikator responsivitas dapat dipahami sebagai seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Indikator ini merupakan tanggapan dari kelompok sasaran mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga tanggapan tersebut bisa berupa positif atau negatif. Berdasarkan muatan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pendamping program keluarga harapan di Kabupaten Gresik tidak hanya memaparkan materi dari modul kepada para keluarga penerima manfaat. Dari modul yang sudah dipaparkan tersebut, para keluarga penerima manfaat diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mempraktikkan, sehingga penyampaian materi dapat dikatakan tidak membosankan dan sudah efisien. Hanya saja, tidak semua para

keluarga penerima manfaat dapat menerima itu. Hal ini dikarenakan para keluarga penerima manfaat mencakup orang tua atau lansia, sehingga kehadirannya dalam pertemuan tersebut sudah lebih dari cukup.

Pada indikator responsivitas yang diukur dari pengetahuan keluarga penerima manfaat terhadap keseluruhan tahapan/proses pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik sudah cukup baik. Hal ini karena setiap kecamatan sudah didampingi oleh para pendamping program yang bertugas untuk membantu menyalurkan dan memberi arahan kepada keluarga penerima manfaat. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum yang dipahami keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gresik tentang bantuan sosial program keluarga harapan adalah bantuan untuk sekolah anak, kesehatan, dan lansia. Sedari awal menerima bantuan sosial ini, para penerima mengaku senang. Meskipun bantuan yang diberikan ini bukan bantuan secara menyeluruh, namun mereka merasa bersyukur karena dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban pengeluaran keluarga, terlebih biaya sekolah yang saat ini semakin mahal. Mereka juga berharap bahwa bantuan ini dapat berjalan terus dan membawa banyak manfaat untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Dengan demikian, responsivitas pada pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik diketahui sudah memenuhi kriteria, karena mendapat respon yang cukup positif dari para keluarga penerima manfaat. Kebijakan program ini telah memberi kepuasan terhadap keluarga penerima manfaat Kabupaten Gresik agar bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam memberikan tahapan atau proses pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik sudah dilakukan dengan baik. Kemudian sosialisasi dan edukasi sebagai kegiatan untuk mempermudah masyarakat memahami tekait dengan proses penerimaan bantuan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik.

Ketepatan

Pada indikator ketepatan dapat dipahami sebagai pernyataan mengenai apakah pemilihan alternatif kebijakan yang dicapai dapat benar-benar bermanfaat bagi kelompok sasaran. Indikator ini pun menilai pemilihan alternatif tersebut bisa memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Sehingga, kebijakan dapat dinilai tepat atau sesuai apabila alternatif yang ditentukan memberikan dampak yang positif. Namun, apabila memberikan dampak yang negatif maka kebijakan tersebut dinilai kurang tepat, sehingga diperlukan membuat alternatif baru. Dalam hal ini, Kebijakan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik dapat dikatakan tepat apabila mampu memberikan manfaat terhadap keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gresik. Berdasarkan muatan hasil penelitian, dari indikator ketepatan sudah bermanfaat untuk masyarakat miskin dan rentan yang menerima bantuan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik. Selain itu, program tersebut memberikan dampak yang positif bagi keluarga penerima manfaat, karena program ini terfokuskan untuk memberi biaya pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian terkait dengan bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat, jarang ditemukan adanya pengembalian bantuan program keluarga harapan karena bantuan program keluarga harapan ini berguna untuk meringankan beban ekonomi mereka. Serta, membantu dalam biaya hidup yang lainnya. Dalam penerapannya tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan dan syarat mengenai komponen penerima program keluarga harapan.

Akan tetapi, karena adanya komponen bersyarat sebagai penerima program keluarga harapan, tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Gresik bisa memperoleh bantuan ini. Komponen ini ditentukan dengan kebijakan program keluarga harapan, yaitu untuk masyarakat miskin dalam menunjang biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam 3 (tiga) kriteria/komponen tersebut kategori pendidikan ditujukan untuk anak usia sekolah, kemudian kategori kesehatan ditujukan untuk ibu hamil dan anak usia balita, sedangkan kategori kesenjangan sosial ditujukan pada lansia dan disabilitas. Pada realitas yang ada, program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih terdapat beberapa faktor penghambat. Salah satu penghambat yang membuat penerima program menjadi tidak tepat sasaran yaitu, adanya data yang masuk ke Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan yang ada di kondisi lapangan. Hal ini membuat masyarakat yang sudah tergolong mampu masih mendapatkan bantuan program, sehingga dampaknya masyarakat miskin dan rentan yang seharusnya menjadi sasaran penerima tidak dapat memperoleh bantuan program keluarga harapan tersebut. Karena hal tersebut, masih terdapat protes dari penerima bantuan. Dengan demikian, pada indikator ketepatan ini diketahui

bahwa program keluarga harapan di Kabupaten Gresik belum tepat sasaran. Dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih terdapat protes. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dari masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Indikator efektivitas mengacu pada tujuan dilaksanakannya program keluarga harapan. Dalam hal ini, tujuan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik hanya ada satu aspek yang tercapai, yakni meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik. Sedangkan, untuk tujuan program keluarga harapan yang lain, yakni mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian dari keluarga penerima manfaat dalam menggunakan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, pada tingkat efektivitas program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih belum cukup efektif.
2. Pada indikator efisiensi, aspek kajian sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya fasilitas tersebut, dapat memperlihatkan kegiatan program keluarga harapan yang ada di Kabupaten Gresik sudah cukup efisien. Dengan demikian, tingkat efisiensi pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik sudah tergolong efisien. Hal ini dikarenakan pemenuhan sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan competence masing-masing, seperti pendamping program keluarga harapan yang berasal dari pekerja sosial. Kemudian, pemenuhan sumber daya waktu yang diarahkan bersifat menyesuaikan, sehingga tidak ada jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Terakhir, untuk pemenuhan sumber daya fasilitas yang sudah baik karena terdapat fasilitas berupa modul untuk menunjang kegiatan terkait program keluarga harapan. Kemudian, untuk proses penyaluran juga sudah melalui mesin ATM agar semakin efisien.
3. Pada indikator perataan ini, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih kurang dalam memenuhi kriteria kecukupan. Total jumlah kemiskinan di Kabupaten Gresik masih berjumlah 42.244 jiwa banyak dan belum teratasi dengan maksimal. Meskipun demikian, keluarga penerima manfaat telah merasa tercukupi dan terbantu terhadap biaya pendidikan anak. Namun sangat disayangkan bantuan tersebut dirasa oleh keluarga penerima manfaat hanya mencukupi untuk kebutuhan biaya sekolah anak, sedangkan untuk pendapatan sehari-hari atau kebutuhan pokok lainnya masih kurang cukup.
4. Pada indikator ini diketahui program keluarga harapan di Kabupaten Gresik belum memenuhi kriteria perataan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan. Karena adanya faktor hambatan tertentu yakni data yang dikirim dari desa tidak dilakukan pembaruan atau *update* data sehingga keluarga penerima manfaat yang terindikasi sudah mampu masih tetap diberi bantuan tersebut. Hal ini membuat masyarakat miskin dan rentan keseluruhan yang seharusnya bisa menjadi sasaran dari kebijakan program keluarga harapan menjadi tidak mendapatkan bantuan program tersebut. Oleh karena itu, dapat menimbulkan adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang layak sebagai penerima bantuan.
5. Pada indikator ini diketahui kebijakan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik sudah memenuhi kriteria responsivitas, karena program tersebut telah memberi tanggapan postif terkait kepuasan terhadap keluarga penerima manfaat Kabupaten Gresik agar bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam memberikan tahapan atau proses pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik sudah dilakukan dengan baik. Kemudian, sosialisasi dan edukasi sebagai kegiatan untuk mempermudah masyarakat memahami tekait dengan proses penerimaan bantuan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik.
6. Pada indikator ketepatan ini diketahui bahwa program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih belum tepat sasaran. Karena adanya komponen bersyarat sebagai penerima program keluarga harapan, tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Gresik bisa memperoleh bantuan ini.

Komponen ini ditentukan dengan kebijakan program keluarga harapan, yaitu untuk masyarakat miskin dalam menunjang biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara bersyarat. Kemudia program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih terdapat beberapa faktor penghambat untuk mencapai ketepatan sasaran. Salah satu penghambat yang membuat penerima program menjadi tidak tepat sasaran yaitu, adanya data yang masuk ke Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan yang ada di kondisi lapangan. Sehingga dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih terdapat protes dari masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. 2015. *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani, Ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2022. Grafik Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2021. Retrieved December 25, 2022, from https://gresikkab.bps.go.id/site/resultTab

Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadja Mada University Press.

Hardani, Andriani, H., Auliya, N. H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., … Istiqomah, R. R. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Kurniawan, A., Hakim, L., & Ramdani, R. 2021. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. *Government and Political Studies*, *4*(1), 40–51.

Larasati, D. C. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sisir. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *7*(2), 40–48.

Panjaitan, D. T. M. R. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Medan Baru Kotan Medan. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, *2*(3), 2002–2004.

Razali, M. T., & Putri, M. D. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018. *Jurnal Kemunting*, *1*(1), 58–134.

Wibawani, S., Hernanda, F., Kusuma, R. G., & Irawan, F. A. 2021. Evaluasi Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. *Syntax Idea*, *3*(5), 1205. Retrieved from https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1194

Yudid B S Tlonaen, Hardianto, W. T., & Diahloka, C. 2014. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *3*(1), 29–37.

Zahrawati, D., & Muchtar, H. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman. *Journal of Civic Education*, *1*(4), 384–394. https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.51